

Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Proses Penetapan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan PT PLN (Persero) UID Suluttenggo

Sheren Gebriela Manginsihi¹, Jacqueline Greety Wenas², Jolly Lucky Raymond Turangan³

^{1,2,3} Program Studi D4 Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

E-mail: manginsihisheran04@gmail.com

Article History:

Received: 09 Mei 2026

Revised: 23 Juni 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Keywords: Sistem Informasi Akuntansi; Anggaran; SKKI & SKKO; Pengendalian Internal; Pemisahan Fungsi

Abstract: Keandalan sistem penganggaran pada badan usaha milik negara tidak semata-mata bergantung pada tertib administrasi, melainkan juga pada ketegasan pembagian peran antara fungsi penyusunan dan fungsi pemeriksaan. Penelitian ini bermula dari pengamatan lapangan yang mendapati bahwa staf yang menyusun dokumen Surat Ketetapan Kerja Investasi (SKKI) dan Surat Ketetapan Kerja Operasi (SKKO) juga menjalankan fungsi verifikasi awal atas dokumen yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mutu pengendalian internal yang berjalan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menelusuri mekanisme pengusulan dan penetapan anggaran melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen terhadap Manajer Keuangan dan Staf Anggaran yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur dokumen dari SKAO dan SKAI hingga diterbitkannya SKKO dan SKKI sudah berjalan secara terstruktur dan berjenjang. Akan tetapi, perangkapan peran di tahap awal pengusulan bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi dalam kerangka COSO. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan alur dokumen SKKI dan SKKO secara spesifik serta identifikasi celah pengendalian internal berbasis COSO pada BUMN sektor kelistrikan. Diperlukan penugasan staf terpisah untuk fungsi verifikasi independen guna memperkuat keandalan sistem penganggaran sebagai bagian dari Sistem Informasi Akuntansi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir membawa perubahan mendasar pada cara organisasi mengelola keuangannya. Di Indonesia, perubahan ini dirasakan di berbagai lapisan, mulai dari perusahaan swasta hingga badan usaha milik negara, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Adopsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi salah satu langkah strategis yang diambil

organisasi sebagai respons terhadap tuntutan tersebut (Hilia Anriva, 2024). Melalui SIA, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara lebih efisien, memantau kinerja operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Secara konseptual, SIA merupakan kerangka terpadu yang menghimpun prosedur, alur dokumen, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme otorisasi dalam satu sistem yang koheren guna menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Marshall B. Romney, 2018). Namun dalam penerapannya, SIA tidak jarang menghadapi hambatan. Ketidakjelasan prosedur, lemahnya pengendalian, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia merupakan persoalan yang kerap muncul berulang dan berpotensi menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan (Sumigar et al., 2025).

Di antara berbagai subsistem SIA, penganggaran menempati posisi yang sangat strategis. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai panduan alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian manajerial melalui perbandingan antara rencana dan realisasi (Rina Sonia & Purwanti, 2025). Efektivitas sistem penganggaran bertumpu pada prosedur yang rinci, kelengkapan dokumentasi di setiap tahapan, dan mekanisme otorisasi yang terstruktur. Ketiga elemen ini menjadi semakin krusial di lingkungan BUMN mengingat besarnya tanggung jawab terhadap pengelolaan aset negara (Khaddafi et al., 2024); (Lintong et al., 2025).

Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo), proses penganggaran dilaksanakan melalui penerbitan dokumen formal berjenjang. Usulan anggaran dari unit kerja disampaikan dalam format Surat Ketetapan Anggaran Operasi (SKAO) untuk kegiatan rutin dan Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI) untuk kegiatan pengembangan, yang selanjutnya diproses melalui serangkaian verifikasi dan persetujuan hingga ditetapkan menjadi Surat Ketetapan Kerja Operasi (SKKO) dan Surat Ketetapan Kerja Investasi (SKKI) sebagai dasar resmi pelaksanaan kegiatan.

Penelusuran awal di lapangan mengungkap sebuah kondisi yang menjadi titik tolak penelitian ini: staf yang bertugas menyusun dokumen SKKI dan SKKO ternyata sekaligus menjalankan fungsi pemeriksaan awal terhadap dokumen yang sama melalui pembubuhan paraf sebelum dokumen diteruskan ke tahap berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya perangkapan fungsi pada tahap awal pengusulan anggaran. Dalam perspektif pengendalian internal, pemisahan fungsi merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan karena keberadaannya dirancang untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi guna mencegah kesalahan maupun penyimpangan (Mulyadi, 2016). Jika kondisi tersebut dibiarkan, kelemahan ini berpotensi memengaruhi keandalan informasi anggaran dan efektivitas pengendalian secara menyeluruh dalam jangka panjang.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah diidentifikasi sebagai landasan penelitian ini. (Astari & Krisna Dewi, 2023) mendapati bahwa PLN Rayon Gianyar secara umum telah memenuhi elemen-elemen dasar SIA, meski masih ada keterbatasan akibat sentralisasi sebagian proses. (Wulandari & Bangun, 2022) mengidentifikasi kelemahan dalam dokumentasi dan pemisahan fungsi pada sistem akuntansi PLN ULP Tigabinanga. (Dewi et al., 2021) membuktikan bahwa kejelasan distribusi tugas berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal. (Tandaju et al., 2022) mencatat bahwa penyusunan anggaran pada PLN UID Sulawesi Bagian Utara belum sepenuhnya mengikuti prinsip penganggaran yang baik. Meski demikian, kajian yang secara spesifik menelaah mekanisme pengusulan dan penetapan anggaran melalui instrumen SKKI dan SKKO sekaligus mengevaluasi pemisahan fungsinya dalam konteks BUMN sektor kelistrikan masih sangat terbatas. Di sinilah celah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini menetapkan dua tujuan utama: (1) menganalisis mekanisme pengusulan dan penetapan anggaran melalui penerbitan SKKI dan SKKO sebagai komponen SIA pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo; dan (2) mengevaluasi pembagian fungsi dalam proses penyusunan, verifikasi, dan persetujuan dokumen SKKI dan SKKO berdasarkan kerangka COSO. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memperluas kajian SIA di sektor publik; secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi manajemen dalam membenahi tata kelola penganggaran yang lebih akuntabel.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan seperangkat formulir, catatan, dan laporan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menyediakan informasi keuangan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen (Mulyadi, 2016). Dalam kerangka tersebut, (Mulyadi, 2016) merinci unsur-unsur pokok sistem akuntansi menjadi lima elemen: (1) formulir, (2) jurnal, (3) buku besar, (4) buku pembantu, dan (5) laporan. (Marshall B. Romney, 2018) memperluas kerangka ini dengan menegaskan bahwa SIA merupakan sistem terpadu yang mengelola data keuangan melalui proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan, dengan melibatkan manusia, teknologi, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta mekanisme pengendalian internal. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga unsur SIA menurut (Mulyadi, 2016) yang relevan dengan mekanisme penganggaran, yaitu formulir, catatan akuntansi, dan prosedur, serta komponen pengendalian internal yang dievaluasi menggunakan kerangka COSO. (Hall, 2019) menambahkan bahwa SIA merupakan subsistem informasi manajemen yang menyajikan informasi keuangan bagi pengguna internal maupun eksternal sekaligus menopang efektivitas pengendalian organisasi.

Komponen pertama, formulir dan dokumen, berfungsi sebagai media untuk mendokumentasikan setiap peristiwa keuangan secara resmi sekaligus sebagai alat komunikasi antarpihak yang terlibat dalam suatu proses bisnis (Mulyadi, 2016). (Ismarmiaty et al., 2024) menegaskan dua fungsi utama dokumen dalam SIA: sebagai bukti yang dapat diverifikasi atas transaksi yang terjadi, dan sebagai media transmisi informasi kepada pemangku kepentingan. Pada proses penganggaran di lingkungan BUMN, fungsi formulir diemban oleh dokumen-dokumen resmi yang berperan sebagai instrumen komunikasi antara unit pengusul dan unit yang berwenang memberikan persetujuan. Surat Ketetapan Anggaran Operasi (SKAO) merupakan formulir pengajuan untuk kebutuhan operasional rutin, sedangkan Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI) digunakan untuk kebutuhan pengembangan dan investasi. Setelah melalui serangkaian verifikasi dan persetujuan berjenjang, kedua dokumen usulan tersebut ditetapkan menjadi Surat Ketetapan Kerja Operasi (SKKO) dan Surat Ketetapan Kerja Investasi (SKKI) sebagai dasar resmi pelaksanaan kegiatan. Perancangan dokumen yang baik, yang mencakup kelengkapan informasi, kejelasan substansi, dan alur distribusi yang logis, merupakan bagian tidak terpisahkan dari desain SIA yang efektif (Putri et al., 2018).

Komponen kedua, catatan akuntansi, berwujud sebagai rekap sistematis atas seluruh dokumen anggaran yang diproses dalam satu periode, arsip dokumen usulan, serta catatan rekapitulasi verifikasi yang dikelola oleh fungsi anggaran. Catatan-catatan ini membentuk jejak audit yang memungkinkan penelusuran historis atas setiap keputusan anggaran dan mendukung akuntabilitas proses secara menyeluruh (Ismarmiaty et al., 2024). Komponen ketiga, prosedur,

berfungsi sebagai panduan operasional yang menjamin konsistensi dalam proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan. Prosedur yang baik mencakup urutan kegiatan yang logis, kejelasan pihak yang bertanggung jawab di setiap tahapan, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan di masing-masing titik proses. Pihak-pihak yang terlibat dalam alur penganggaran, mulai dari staf penyusun, manajer keuangan, hingga pejabat pengesah, merupakan bagian integral dari prosedur SIA yang dirancang untuk memastikan setiap tahapan mendapatkan pengawasan dari fungsi yang berbeda. Untuk memvisualisasikan prosedur secara sistematis, bagan alir dokumen digunakan sebagai representasi yang juga berfungsi mengidentifikasi potensi celah pengendalian (Mulyadi, 2016).

Selain unsur-unsur di atas, (Marshall B. Romney, 2018) menambahkan komponen peralatan dan infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari SIA modern, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan fasilitas penyimpanan data. Dalam konteks penelitian ini, komponen tersebut tidak menjadi fokus kajian karena analisis dibatasi pada mekanisme dokumentasi, prosedur, dan pengendalian proses penganggaran yang dapat diamati melalui dokumen dan wawancara. Dengan demikian, kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada unsur formulir, catatan akuntansi, prosedur, dan pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2016), yang seluruhnya memiliki padanan langsung dalam mekanisme penganggaran pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo.

Komponen kelima, pengendalian internal, merupakan elemen paling strategis dalam SIA karena berperan memastikan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menekan risiko kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (Tampenawas et al., 2025). Kerangka *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) menetapkan lima komponen pengendalian internal yang saling terkait: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan (Firdaus & Safriani, 2025). Di antara kelima komponen tersebut, aktivitas pengendalian mencakup dua dimensi yang secara langsung relevan terhadap sistem penganggaran: pemisahan fungsi (*Segregation of Duties/SoD*) dan mekanisme otorisasi.

Prinsip SoD mensyaratkan bahwa tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas seluruh tahapan suatu transaksi (Tilak, 2016). Dalam praktiknya, SoD mengharuskan pemisahan tegas antara empat fungsi utama: otorisasi, penguasaan aset, pencatatan, dan verifikasi. Apabila dua fungsi atau lebih dijalankan oleh orang yang sama, akan timbul konflik kepentingan yang membuka peluang manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks penganggaran, SoD secara khusus mensyaratkan pemisahan antara fungsi penyusunan dokumen dan fungsi pemeriksaan awal. Mekanisme otorisasi, sebagai dimensi lain dari aktivitas pengendalian, memastikan bahwa setiap transaksi hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai struktur yang ditetapkan (Marshall B. Romney, 2018). (Mohan Pitchikala, 2024) membedakan dua bentuk otorisasi: otorisasi umum yang berlaku bagi kategori transaksi tertentu, dan otorisasi khusus untuk transaksi individual dengan risiko lebih tinggi. Integrasi antara SoD dan mekanisme otorisasi yang berjenjang merupakan perwujudan konkret dari pengendalian internal dalam SIA yang efektif, khususnya pada proses penganggaran di lingkungan BUMN yang mengelola aset negara dalam skala besar (Khaddafi et al., 2024).

Penganggaran (Budgeting)

Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode tertentu, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan. (Hansen & Mowen, 2018) menjelaskan bahwa anggaran dikembangkan sekaligus sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian, di mana capaian aktual dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja. (Nuuridha Matiin Tahta, 2024) menambahkan bahwa anggaran merupakan wujud perencanaan formal dan sistematis yang berfungsi sebagai pedoman operasional organisasi. Secara lebih luas, anggaran mengemban empat fungsi strategis: perencanaan alokasi sumber daya, pengendalian manajerial melalui perbandingan rencana dan realisasi, koordinasi antarbagian, serta evaluasi kinerja secara periodik (Hansen & Mowen, 2018); (Rina Sonia & Purwanti, 2025).

(Anthony & Govindarajan, 2007) menegaskan bahwa penyusunan anggaran merupakan tahapan sentral dalam sistem pengendalian manajemen, tempat strategi puncak manajemen diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang terukur. Proses penganggaran secara umum berlangsung melalui lima tahapan yang berurutan: (1) penyusunan usulan anggaran oleh unit kerja, (2) verifikasi substansi dan kelengkapan dokumen oleh fungsi yang berbeda, (3) persetujuan berjenjang sesuai hierarki kewenangan, (4) penetapan resmi dalam dokumen anggaran yang memiliki kekuatan hukum, dan (5) pemantauan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan (Khaddafi et al., 2024); (Lintong et al., 2025). Dalam proses tersebut, pihak yang terlibat tidak semata berfungsi sebagai pengesah administratif, melainkan merupakan bagian integral dari prosedur pengendalian yang memastikan setiap keputusan anggaran diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai struktur organisasi. (Wenas et al., 2020) menegaskan bahwa ketika pemerintah daerah tidak menjalankan proses penganggaran secara disiplin dan terkendali, munculnya perilaku oportunistik dalam pengalokasian anggaran menjadi risiko nyata yang sulit dihindari.

Dalam lingkungan BUMN dan organisasi pemerintahan, anggaran umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama sesuai sifat kebutuhannya: anggaran operasional untuk membiayai kegiatan rutin yang berulang setiap periode, dan anggaran investasi untuk membiayai kegiatan pengembangan atau peningkatan aset jangka panjang (Rina Sonia & Purwanti, 2025). Perbedaan ini tercermin dalam dokumen-dokumen formal yang digunakan sebagai instrumen penganggaran. Dalam konteks Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai formulir resmi yang mendokumentasikan setiap tahapan proses penganggaran, mulai dari pengajuan usulan hingga penetapan keputusan akhir (Mulyadi, 2016). Dokumen pengajuan usulan anggaran, baik untuk keperluan operasional maupun investasi, berfungsi sebagai sarana komunikasi formal antara unit pengusul dan pihak yang berwenang memberikan persetujuan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian yang memuat rincian kebutuhan anggaran yang dapat diverifikasi secara independen. Setelah melalui tahapan verifikasi dan persetujuan berjenjang, dokumen tersebut ditetapkan sebagai dokumen kerja resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan dokumen dalam proses penganggaran telah mendukung fungsi formulir dalam Sistem Informasi Akuntansi, khususnya dalam menjamin keterlacakan dan akuntabilitas setiap usulan anggaran. Pada PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, fungsi formulir ini diemban oleh empat instrumen penganggaran: Surat Ketetapan Anggaran Operasi (SKAO) dan Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI) sebagai dokumen pengajuan usulan, serta Surat Ketetapan Kerja Operasi (SKKO) dan Surat Ketetapan Kerja Investasi (SKKI) sebagai dokumen penetapan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Penganggaran merupakan salah satu subsistem paling strategis dalam SIA karena mengintegrasikan seluruh komponen sistem secara nyata dalam satu siklus yang berulang.

(Marshall B. Romney, 2018) menjelaskan bahwa efektivitas penganggaran sebagai bagian dari SIA sangat bergantung pada tiga kondisi: prosedur yang rinci dan terdokumentasi, kelengkapan formulir di setiap tahapan, serta mekanisme pengendalian internal yang berfungsi sebagai penyangga keandalan informasi. Dalam dimensi pengendalian, dua prinsip menjadi krusial: pemisahan fungsi (*Segregation of Duties*) yang memastikan tidak ada individu yang mengendalikan lebih dari satu tahapan kritis secara bersamaan, dan mekanisme otorisasi berjenjang yang memastikan setiap keputusan anggaran disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai hierarki yang ditetapkan. Kedua prinsip ini merupakan wujud konkret dari komponen aktivitas pengendalian dalam kerangka COSO yang diterapkan dalam sistem penganggaran (Firdaus & Safriani, 2025). Absennya salah satu prinsip tersebut berpotensi menciptakan celah yang melemahkan keandalan informasi anggaran secara menyeluruh, termasuk meningkatkan risiko terjadinya kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap awal penyusunan dokumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Sebagaimana diungkapkan (Niam et al., 2024), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan menggali dan memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteksnya yang sesungguhnya, bersifat interpretatif, serta tidak mengutamakan angka sebagai medium utama analisis. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mekanisme penganggaran di PLN Suluttenggo tidak dapat dipahami secara memadai hanya dari data statistik, melainkan memerlukan penelusuran ke dimensi proses, interaksi antaraktor, dan konteks kelembagaan yang melingkupinya.

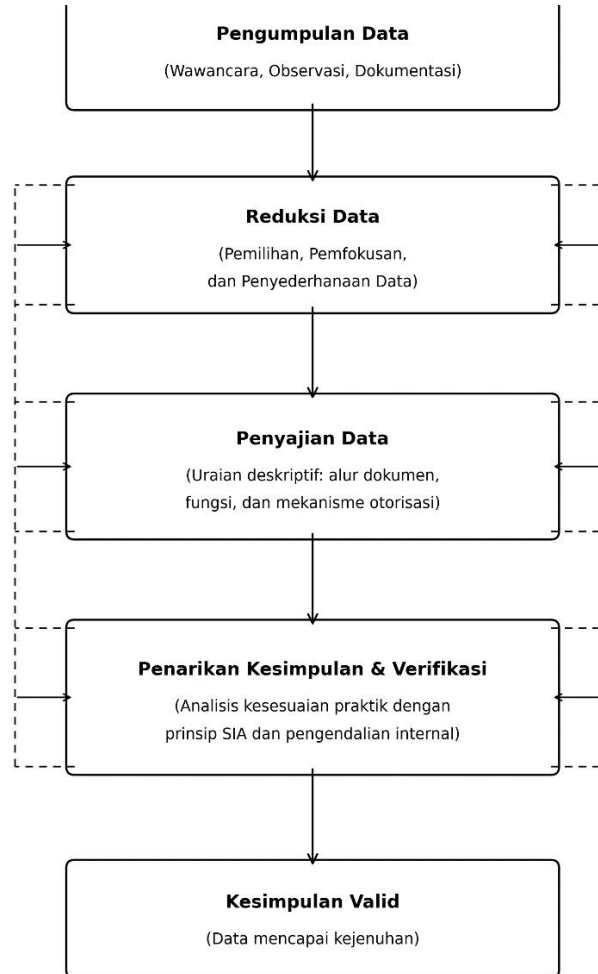
Lokasi penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) di Kota Manado, Sulawesi Utara. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu Manajer serta Staf pada bagian Keuangan dan Anggaran yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, verifikasi, dan penerbitan dokumen SKKI dan SKKO. Objek penelitian difokuskan pada mekanisme pengusulan dan penetapan anggaran melalui SKKI dan SKKO, yang dianalisis berdasarkan tiga aspek utama, yaitu alur dokumen, pemisahan fungsi, dan mekanisme otorisasi dalam kerangka Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Data dikumpulkan dari dua sumber. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dari informan terpilih. Data sekunder bersumber dari dokumen prosedur pengelolaan anggaran, bagan alir proses bisnis, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data menggabungkan tiga metode: (1) wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam mengenai alur dokumen, pembagian fungsi, dan mekanisme otorisasi; (2) dokumentasi terhadap dokumen resmi prosedur penerbitan SKKI dan SKKO; serta (3) observasi langsung pada Bagian Keuangan dan Anggaran yang difokuskan pada proses penyusunan, verifikasi, pembubuhan paraf, dan distribusi dokumen.

Analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang dijalankan secara berkesinambungan hingga tercapai kejenuhan data, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. Proses analisis mencakup tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan mekanisme penerbitan SKKI dan SKKO; (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif terstruktur mencakup alur dokumen, pembagian fungsi, serta mekanisme otorisasi; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni analisis kesesuaian antara praktik lapangan dan prinsip SIA, khususnya yang berkaitan dengan pemisahan

fungsi dan pengendalian internal berbasis COSO.

Gambar 1. Analisis Data Model Interaksi Miles dan Huberman



(Sumber Miles dan Huberman dalam (Niam et al., 2024))

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulir dan Dokumen dalam Proses Penganggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo menggunakan empat dokumen utama yang saling berkaitan, yaitu Surat Ketetapan Anggaran Operasi (SKAO), Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI), Surat Ketetapan Kerja Operasi (SKKO), dan Surat Ketetapan Kerja Investasi (SKKI). SKAO dan SKAI digunakan pada tahap pengajuan usulan anggaran oleh unit kerja, sedangkan SKKO dan SKKI diterbitkan setelah usulan memperoleh persetujuan berjenjang dan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, setiap dokumen telah memuat informasi yang cukup lengkap, seperti identitas kegiatan, rincian kebutuhan anggaran, unit pengusul, serta pihak yang memberikan persetujuan. Selain itu, distribusi dokumen dilakukan secara berurutan sesuai jalur kewenangan sehingga memudahkan proses penelusuran dan pengawasan dokumen

anggaran.

Penggunaan dokumen yang tersusun secara sistematis menunjukkan bahwa fungsi formulir dalam sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan cukup baik. Dokumen tidak hanya berfungsi sebagai media administrasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antarbagian dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep formulir dalam sistem informasi akuntansi yang menekankan pentingnya dokumentasi dan keterlacakan informasi keuangan (Mulyadi, 2016). Keberadaan SKAO, SKAI, SKKO, dan SKKI menunjukkan bahwa sistem penganggaran pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah menerapkan dokumentasi formal yang mendukung prinsip keterlacakan informasi dalam Sistem Informasi Akuntansi. Kelengkapan dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas karena setiap tahapan penganggaran dapat ditelusuri berdasarkan dokumen yang terdokumentasi secara berjenjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi formulir dalam SIA telah mendukung pengendalian administratif dan koordinasi antarunit dalam proses penganggaran.

Catatan Akuntansi dalam Proses Penganggaran

Dalam pelaksanaan proses penganggaran, fungsi pencatatan dilakukan melalui penyusunan daftar rekap penerbitan SKKI dan SKKO oleh bagian anggaran. Selain itu, seluruh dokumen usulan beserta lampiran pendukung diarsipkan secara sistematis sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan penganggaran.

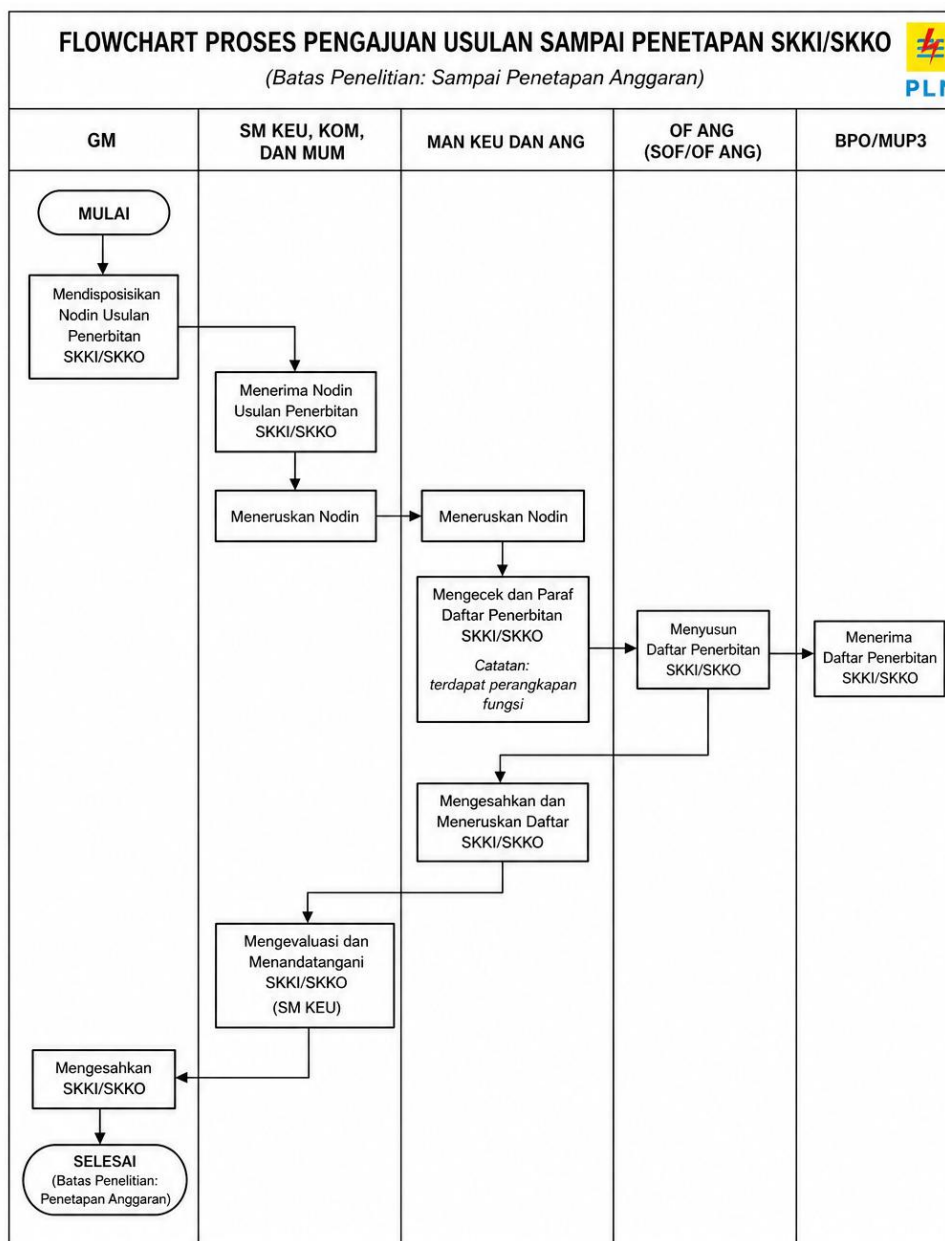
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencatatan tersebut memudahkan bagian keuangan dalam melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen yang telah diproses, terutama ketika diperlukan evaluasi maupun pemeriksaan internal. Keberadaan arsip dan rekapitulasi verifikasi juga membantu memastikan bahwa setiap tahapan penganggaran memiliki bukti administratif yang jelas.

Catatan dan arsip dokumen tersebut membentuk jejak audit yang mendukung akuntabilitas proses penganggaran secara menyeluruh. Dengan demikian, fungsi pencatatan dalam sistem penganggaran telah berjalan cukup memadai dan mendukung pengendalian administratif dalam pengelolaan anggaran perusahaan. Keberadaan rekapitulasi penerbitan SKKI dan SKKO serta arsip dokumen pendukung menunjukkan bahwa fungsi pencatatan dalam sistem penganggaran tidak hanya berorientasi pada penyimpanan data, tetapi juga mendukung transparansi dan kemudahan penelusuran dokumen ketika dilakukan evaluasi maupun pemeriksaan internal. Dengan adanya jejak audit yang tersusun secara sistematis, risiko kehilangan informasi maupun kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Anggaran melalui SKKI dan SKKO

Komponen ketiga SIA menurut Mulyadi (2016) adalah prosedur, yaitu panduan operasional yang menjamin konsistensi dalam proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan. Untuk memvisualisasikan prosedur secara sistematis, bagan alir dokumen digunakan sebagai representasi yang sekaligus berfungsi mengidentifikasi potensi celah pengendalian (Mulyadi, 2016). Bagan alir proses pengusulan dan penetapan anggaran pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Flowchart Pengajuan Usulan dan Penetapan Anggaran



Sebagaimana tampak pada Gambar 2, prosedur pengusulan anggaran dimulai dari disposisi Nota Dinas (Nodin) oleh General Manager (GM) kepada Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum (SM KEU, KOM, DAN MUM), yang selanjutnya diteruskan kepada Manager Keuangan dan Anggaran (MAN KEU DAN ANG). Dokumen usulan kemudian diproses oleh fungsi anggaran melalui penyusunan daftar penerbitan SKKI dan SKKO yang dilaksanakan oleh Senior Officer/Officer Anggaran (SOF/OF ANG). Pihak-pihak yang terlibat dalam alur ini merupakan bagian integral dari prosedur SIA yang dirancang untuk memastikan setiap tahapan mendapatkan pengawasan dari fungsi yang berbeda (Mulyadi, 2016).

Dalam alur tersebut, Manajer Keuangan dan Anggaran tidak hanya meneruskan dokumen,

tetapi juga melakukan pengecekan dan pembubuhan paraf terhadap daftar penerbitan sebelum dokumen diteruskan lebih lanjut. Setelah melalui proses konfirmasi dengan pihak terkait (BPO/MUP3), dokumen dikembalikan kepada Manajer Keuangan untuk disahkan, kemudian dievaluasi dan ditandatangani oleh SM KEU sebelum akhirnya ditetapkan oleh GM sebagai anggaran resmi dalam bentuk SKKI dan SKKO.

Perlu dicatat bahwa penelitian ini secara sengaja membatasi cakupan analisis hanya sampai pada tahap penetapan anggaran, sehingga tidak mencakup proses selanjutnya seperti input ke sistem aplikasi, verifikasi tagihan, maupun realisasi anggaran. Pembatasan ini dilakukan agar fokus analisis tetap tajam pada prosedur penyusunan dan penetapan, termasuk evaluasi pengendalian internal pada tahapan kritis tersebut. Prosedur yang ditemukan mencerminkan penerapan prinsip dokumentasi tertib sebagaimana dikemukakan (Putri et al., 2018), sekaligus sejalan dengan fungsi SIA menurut (Hall, 2019) dalam mendukung pengendalian internal dan pengambilan keputusan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulir, catatan akuntansi, dan prosedur dalam proses penganggaran saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan mekanisme Sistem Informasi Akuntansi. Dokumen yang lengkap mendukung proses pencatatan yang tertib, sedangkan prosedur yang berjenjang memastikan distribusi dokumen berjalan sesuai struktur kewenangan. Dengan demikian, efektivitas sistem penganggaran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen, tetapi juga oleh keterhubungan antar komponen dalam menghasilkan informasi anggaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian Internal: Pemisahan Fungsi dan Mekanisme Otorisasi dalam SKKI dan SKKO

Komponen kelima dan paling strategis dalam SIA menurut (Mulyadi, 2016) adalah pengendalian internal, yang berperan memastikan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka COSO, komponen aktivitas pengendalian mencakup dua dimensi yang secara langsung relevan terhadap sistem penganggaran: pemisahan fungsi (*Segregation of Duties/SoD*) dan mekanisme otorisasi. Temuan paling krusial dari penelitian ini berkaitan dengan pemisahan fungsi di tahap awal pengusulan anggaran. Berdasarkan analisis bagan alir pada Gambar 2, teridentifikasi bahwa Staf Anggaran yang bertugas menyusun dokumen SKKO dan SKKI juga menjalankan fungsi pemeriksaan awal terhadap dokumen yang sama melalui pembubuhan paraf sebelum dokumen diproses lebih lanjut. Artinya, satu individu secara bersamaan menjalankan dua fungsi yang seharusnya dipisahkan, yaitu fungsi penyusunan (*recording*) dan fungsi verifikasi awal (*verification*).

Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *Segregation of Duties* (SoD) yang mensyaratkan bahwa tidak seharusnya satu individu memiliki kendali penuh atas lebih dari satu tahapan dalam suatu transaksi (Tilak, 2016). (Mulyadi, 2016) menegaskan bahwa pemisahan fungsi merupakan prinsip mendasar dalam pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan melalui mekanisme saling mengawasi antarfungsi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Wulandari & Bangun, 2022) yang juga menemukan kelemahan serupa dalam aspek pemisahan fungsi pada sistem akuntansi PLN ULP Tigabinanga.

Dari kondisi perangkapan fungsi tersebut, setidaknya tiga risiko nyata dapat diidentifikasi. Pertama, potensi manipulasi data meningkat karena tidak terdapat pemeriksaan independen di tahap awal. Kedua, mekanisme *cross-check* yang seharusnya menjadi penyangga integritas informasi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, kesalahan administratif yang sebenarnya dapat dicegah di tahap awal berpeluang lolos tanpa terdeteksi lebih lanjut. Secara keseluruhan, ketiga risiko tersebut melemahkan fondasi pengendalian internal pada sistem

penganggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal tidak selalu muncul dalam bentuk kegagalan prosedur secara keseluruhan, melainkan dapat terjadi pada titik tertentu yang tampak administratif namun memiliki dampak signifikan terhadap keandalan informasi. Dalam konteks ini, perangkapan fungsi pada tahap awal pengusulan anggaran berpotensi mengurangi independensi pemeriksaan sehingga mekanisme pengendalian menjadi kurang optimal.

Berbeda dengan kondisi di tahap awal, mekanisme otorisasi pada tahap persetujuan terbukti berjalan dengan lebih baik. Penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai tingkat kewenangan yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan penerapan prinsip otorisasi dalam kerangka COSO. Hal ini konsisten dengan penjelasan (Mohan Pitchikala, 2024) bahwa otorisasi berfungsi memastikan setiap aktivitas dilaksanakan oleh pihak yang benar-benar memiliki kewenangan sesuai struktur organisasi. Dalam konteks BUMN, penguatan pemisahan fungsi menjadi aspek yang penting karena proses penganggaran berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya perusahaan dan akuntabilitas penggunaan dana. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *Segregation of Duties* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap empat unsur Sistem Informasi Akuntansi menurut (Mulyadi, 2016) yang relevan dengan mekanisme penganggaran menunjukkan bahwa tiga unsur, yaitu formulir dan dokumen, catatan akuntansi, serta prosedur, telah berjalan dengan memadai pada sistem penganggaran PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo. Struktur dokumentasi, pencatatan, dan prosedur yang berjenjang tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran telah mendukung keterlacakan informasi dan akuntabilitas proses penetapan anggaran. Namun demikian, efektivitas Sistem Informasi Akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur formal, tetapi juga oleh kualitas pengendalian internal yang mengatur hubungan antar fungsi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian ini, unsur pengendalian internal, khususnya aspek pemisahan fungsi dalam kerangka COSO, belum terpenuhi secara memadai pada tahap awal penyusunan dokumen anggaran karena masih ditemukan perangkapan fungsi antara penyusunan dan verifikasi awal dokumen. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan desain proses dengan cara menugaskan pihak yang berbeda untuk menjalankan verifikasi independen sebelum dokumen diajukan kepada pejabat yang berwenang guna meningkatkan keandalan sistem penganggaran secara menyeluruh.

Tabel 1. Analisis Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Anggaran Berdasarkan Prinsip SIA dan Pengendalian Internal

Komponen SIA (Mulyadi, 2016)	Kondisi yang Ditemukan	Evaluasi Kesesuaian (Mulyadi, 2016 & COSO)
Formulir dan Dokumen (Mulyadi, 2016)	Empat instrumen penganggaran digunakan: SKAO dan SKAI sebagai formulir pengajuan usulan (operasional dan investasi), serta SKKO dan SKKI sebagai dokumen penetapan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan	Sesuai. SKAO, SKAI, SKKO, dan SKKI memenuhi kriteria formulir menurut (Mulyadi, 2016): kelengkapan informasi, kejelasan substansi, dan alur distribusi yang logis, sehingga mendukung keterlacakan dan akuntabilitas anggaran
Catatan Akuntansi (Mulyadi, 2016)	Daftar rekap penerbitan SKKI/SKKO, arsip dokumen	Sesuai. Catatan-catatan tersebut membentuk jejak audit yang

	SKAO dan SKAI beserta berkas pendukung, serta catatan rekapitulasi verifikasi dikelola secara sistematis oleh fungsi anggaran	memungkinkan penelusuran historis atas setiap keputusan anggaran dan mendukung akuntabilitas proses secara menyeluruh (Ismarmiaty et al., 2024); (Mulyadi, 2016)
Prosedur (Mulyadi, 2016)	Prosedur pengusulan berjalan secara berjenjang: SKAO/SKAI dari UP3 diproses melalui disposisi GM, verifikasi SM KEU, rekapitulasi oleh SOF/OF ANG, konfirmasi BPO/MUP3, pengesahan Manajer Keuangan, persetujuan SM KEU, hingga penetapan SKKO/SKKI oleh GM	Sesuai. Prosedur yang ditemukan mencerminkan urutan kegiatan yang logis, kejelasan pihak yang bertanggung jawab di setiap tahapan, dan mekanisme otorisasi berjenjang, sebagaimana disyaratkan dalam prosedur SIA yang efektif (Mulyadi, 2016); (Hall, 2019)
Pengendalian Internal (Mulyadi, 2016 & COSO)	Staf penyusun SKKI/SKKO sekaligus menjalankan pemeriksaan awal melalui pembubuhan paraf (perangkap fungsi penyusunan dan verifikasi). Di sisi lain, mekanisme otorisasi pada tahap persetujuan berjalan baik: penandatanganan dilakukan oleh pejabat berbeda sesuai hierarki kewenangan	Sebagian belum sesuai. Perangkap fungsi penyusunan dan verifikasi bertentangan dengan prinsip Segregation of Duties (SoD) dalam kerangka COSO (Tilak, 2016); (Mulyadi, 2016). Mekanisme otorisasi berjenjang pada tahap persetujuan telah sesuai dengan komponen aktivitas pengendalian COSO (Mohan Pitchikala, 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses penetapan anggaran pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo berdasarkan kerangka komponen SIA menurut (Mulyadi, 2016), yang meliputi formulir dan dokumen, catatan akuntansi, prosedur, serta pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo secara umum telah berjalan secara sistematis dan terstruktur melalui penggunaan dokumen SKAO dan SKAI sebagai instrumen pengajuan usulan anggaran, serta SKKO dan SKKI sebagai dokumen penetapan resmi pelaksanaan kegiatan. Keberadaan dokumen tersebut didukung oleh pencatatan dan pengarsipan yang tertata sehingga membentuk jejak audit yang memadai dalam mendukung keterlacakan dan akuntabilitas proses penganggaran.

Dari sisi prosedur, proses pengusulan dan penetapan anggaran telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai struktur kewenangan, dimulai dari pengajuan usulan oleh unit kerja, verifikasi dan persetujuan oleh pihak terkait, hingga penetapan akhir oleh pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek dokumentasi, pencatatan, dan prosedur dalam sistem penganggaran telah mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi secara cukup memadai.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kelemahan pada aspek pengendalian internal, khususnya terkait prinsip *Segregation of Duties* (SoD) dalam kerangka COSO. Pada tahap awal pengusulan anggaran, staf yang menyusun dokumen SKKI dan SKKO juga menjalankan fungsi pemeriksaan awal melalui pembubuhan paraf pada dokumen yang sama. Perangkap fungsi tersebut berpotensi mengurangi independensi verifikasi dan melemahkan efektivitas pengendalian internal dalam proses penganggaran. Di sisi lain, mekanisme otorisasi

pada tahap persetujuan telah berjalan dengan baik karena dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai hierarki kewenangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemisahan fungsi secara tegas antara penyusunan dokumen dan verifikasi awal dalam proses penganggaran. Penempatan personel yang berbeda pada kedua fungsi tersebut diperlukan untuk memperkuat efektivitas pengendalian internal, menjaga independensi pemeriksaan, serta meningkatkan keandalan informasi anggaran dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BUMN sektor kelistrikan.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan analisis hingga tahap realisasi dan pengawasan anggaran, serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai unit kerja agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem penganggaran perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Astari, N. P. E., & Krisna Dewi, N. K. U. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Gianyar. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 521–535. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.457>
- Dewi, A. A., Hidayati, K., & Rahman, A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus PT. Nirta Majapahit di Surabaya). *UBARA Accounting Journal*, 1(November), 391–399. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Firdaus, R., & Safriani. (2025). Peran Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 9177–9182. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Hall, J. A. (2019). *Accounting Information Systems* (10th ed.). Cengage Learning.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2018). *Managerial Accounting* (15th ed.). Cengage Learning.
- Hilia Anriva, D. (2024). Tantangan Dan Solusi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Indonesia: Sebuah Analisis Tematik. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 97–109. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1182>
- Ismarmiaty, I., Irfan, P., & Al Faras, D. I. (2024). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Dagang dengan Metode Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.30812/rekan.v5i1.3337>
- Khaddafi, M., Siagian, A., Arami, M., Dewi, D., & Sagala, M. (2024). *the Role of Budgeting in Improving the Sustainability of Company Financials*. 5901–5909. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Lintong, J. S., Pijoh, W. C., & Maramis, L. (2025). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*. 1(September), 211–225.
- Marshall B. Romney, P. J. S. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- Mohan Pitchikala, K. (2024). Effective Authorization Mechanisms: Ensuring Secure Access Control on Software Resources. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(6),

969–973. <https://doi.org/10.21275/sr24612005843>

- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Nuuridha Matiin Tahta. (2024). *Penganggaran Perusahaan*. 32(3), 167–186.
- Putri, Y., Asmarani, S., Merlitiani, H., Frabtiwi, A., Sulastri, E., & Sari, M. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. 214.
- Rina Sonia, & Purwanti. (2025). Peranan Anggaran Belanja Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Dan Pengendalian. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208*, 1(3), 299–301. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.232>
- Sumigar, C. A., Pantow, A. K., & Ruhiyat. (2025). *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kredit Non Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur*. 1(September), 211–225.
- Tampenawas, M. A., Akay, P. W., & Yelly Paendong. (2025). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*. 1(September), 211–225.
- Tandaju, C., Saerang, D., Affandi, D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., Kampus, J., & Bahu, U. (2022). Evaluasi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Bidang SDM PT . PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara Budget Evaluation as a Management Control Tool in the Human Resources Sector PT . PLN (Persero) North Sulawesi Develo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 423–432.
- Tilak, J. B. G. (2016). Implementing Segregation of Duties: A Practical Experience Based on Best Practices. *ISACA Journal*, 3, 1–9. <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2016/volume-3/implementing-segregation-of-duties-a-practical-experience-based-on-best-practices>
- Wenas, J. G., Karamoy, H., & Morasa, J. (2020). *Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado Atas Perubahan Dana Alokasi Umum: Suatu Kajian Kualitatif*. 7(1), 21–34.
- Wulandari, B., & Bangun, V. N. B. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada PT PLN Persero Tiga Binanga. *Akuntansi Prima*, 4(1). <https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2554>